

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia.

Di lain pihak dengan diberlakukannya Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. Di satu sisi kebijakan otonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Keragaman potensi sumberdaya pendidikan di daerah yang ada menyebabkan mutu keluaran sekolah sangat bervariasi. Keberadaan satuan pendidikan baik secara jenjang dan jenis di Indonesia yang tersebar di seluruh Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman layanan proses, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta mutunya. Oleh karena itu, standarisasi mutu regional dan nasional merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

Upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu, dimana semua fungsi manajemen yang dijalankan diarahkan semaksimal mungkin dapat memberikan layanan yang sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan upaya untuk mengendalikan mutu (*quality control*). Pengendalian mutu dalam pengelolaan pendidikan tersebut dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber daya pendidikan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya pengendalian mutu dalam bentuk *jaminan atau assurance*, agar semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. Konsep yang terkait dengan hal ini dalam manajemen mutu dikenal dengan *Quality Assurance* atau penjaminan mutu (Moerdayanto, 2010: 2).

Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggungjawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing serta peran serta masyarakat. Pada level Pemerintah dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan Departemen Dalam Negeri serta instansi terkait lainnya. Pada level Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP dan Kantor Wilayah Departemen Agama, sedangkan pada level pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Departemen Agama.

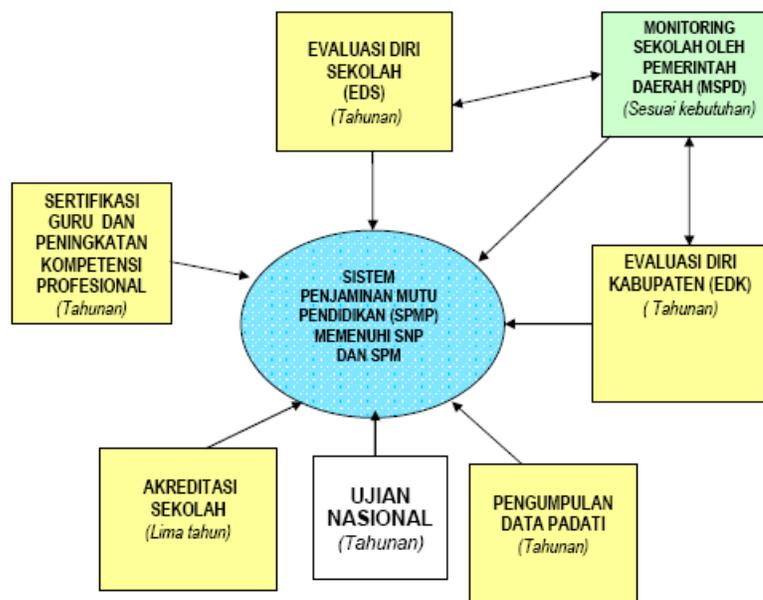
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah di Indonesia melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) sesuai dengan Permendiknas No. 63 tahun 2009.

Implementasi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan hingga saat ini masih menghadapi berbagai macam permasalahan antara lain: (1) belum tersosialisasikannya secara utuh Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan; (2) pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan masih terbatas pada pemantauan komponen mutu di satuan pendidikan; (3) pemetaan mutu masih dalam bentuk pendataan pencapaian mutu pendidikan yang belum terpadu dari berbagai penyelenggara pendidikan; dan (4) tindak lanjut hasil pendataan mutu pendidikan yang belum terkoordinir dari para penyelenggara dan pelaksana pendidikan pada berbagai tingkatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan aspek legal tentang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan meliputi: (1) pengertian dan ruang lingkup penjaminan dan peningkatan mutu; (2) pembagian tugas dan tanggungjawab yang proporsional dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, (3) pencapaian Standar Nasional Pendidikan, dan (4) pengembangan sistem informasi mutu pendidikan yang efektif untuk pengelolaan, pengambilan keputusan dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

SPMP mendefinisikan penjaminan mutu sebagai serangkaian proses dan sistem yang saling terkait untuk mengumpulkan, menganalisa, dan

melaporkan data mengenai kinerja dan mutu dari tenaga kependidikan, program dan lembaga. Proses penjaminan mutu mengidentifikasi bidang-bidang pencapaian dan prioritas untuk perbaikan, menyediakan data untuk pembuatan keputusan berbasis bukti dan membantu membangun budaya perbaikan yang berkelanjutan. Pencapaian mutu pendidikan dikaji berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Model di bawah ini mengetengahkan pengkajian mutu dan metode analisa data:



Gambar 1.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan  
(Sumber: Anonim, 2010: 7)

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa komponen EDS merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menjamin mutu pendidikan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Moerdayanto (2010: 4) yang menyatakan bahwa EDS dapat dilakukan dalam rangka membantu

kabupaten/kota, sekolah dan tenaga kependidikan di sekolah meningkatkan kinerja dan meningkatkan mutu hasil pendidikan siswa.

Sebagai komponen penting dalam SPMP, Evaluasi Diri Sekolah (EDS) merupakan dasar peningkatan mutu dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sekolah. EDS juga menjadi sumber informasi kebijakan untuk penyusunan program pengembangan pendidikan kabupaten/kota. Karena itulah EDS menjadi bagian yang integral dalam penjaminan dan peningkatan mutu. EDS adalah suatu proses yang memberikan tanggung jawab kepada sekolah untuk mengevaluasi kemajuan mereka sendiri dan mendorong sekolah untuk menetapkan prioritas peningkatan mutu sekolah. Kegiatan EDS berbasis sekolah, tetapi proses ini juga mensyaratkan adanya keterlibatan dan dukungan dari orang-orang yang bekerja dalam berbagai tingkatan yang berbeda dalam sistem ini, dan hal ini tentu saja membantu terjaminnya transparansi dan validitasi proses (Anonim, 2010: 8).

Evaluasi diri merupakan kegiatan refleksi terhadap kondisi internal dan eksternal suatu organisasi guna mengenali kondisi real yang ada guna menyusun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya visi dan misi. Evaluasi diri (*self evaluation*) menjadi pijakan institusi dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan (Kondisi Internal), peluang dan ancaman (kondisi eksternal). Sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu memahami konsep evaluasi diri dengan baik dan benar. Dengan pemahaman yang baik tentang evaluasi diri, sekolah akan dapat mengenali potensi yang ada, kelemahan yang perlu diperbaiki, masalah-masalah yang timbul dan penyebab utama

permasalahan guna dicari solusi terhadap kondisi yang ideal atau yang diharapkan dalam visi dan misinya. Sekolah perlu memahami dengan baik dan benar, bagaimana melakukan evaluasi secara komprehensif, terstruktur dan sistematis, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai suatu landasan/dasar proses perencanaan guna mencapai tujuan yang diinginkan/dicita-citakan, yaitu peningkatan kualitas, seperti peningkatan kualitas jurusan/departemen/fakultas dan program-programnya (Ali, 2011: 1-2).

EDS merupakan komponen penentu yang sangat penting dalam sistem pengembangan pendidikan nasional karena dengan EDS sekolah berperan dalam membangun informasi pendidikan nasional terutama dalam memotret kinerja sekolah dalam penerapan SPM dan SNP. Informasi yang terbangun menjadi dasar untuk dasar perencanaan peningkatan mutu berkelanjutan dan pengembangan kebijakan pendidikan pada tingkat kab/kota, provinsi, dan nasional (Anonim, 2010:8).

Dalam rangka mengimplementasikan peningkatan mutu sekolah, maka pihak sekolah harus melakukan evaluasi diri dalam rangka menganalisa kekuatan dan kelemahan mengenai 8 tandar yang telah ditetapkan pemerintah (Ngajum, 2011: 1). Hal ini dilakukan untuk memberikan penilaian kinerja sekolah secara objektif atas dasar standar nasional dalam konteks indikator pencapaian. Proses evaluasi diri sekolah merupakan bagian integral dari penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan. Proses ini menjadi sangat penting karena dapat membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk pengembangan sekolah sehingga dapat menyakini bahwa

kondisi dan apa yang dilakukannya telah memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan standar nasional. Selain itu pihak sekolah dapat memanfaatkan informasi yang telah didapat dari hasil evaluasi diri untuk perencanaan dan pengembangan sekolah dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan.

SDN Pedurungan Tengah 01 Semarang telah melakukan evaluasi diri yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan Tim Pengembang Sekolah yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan evaluasi diri. Kegiatan evaluasi diri yang dilakukan membawa dampak positif bagi sekolah. Ketika dilakukan analisis kelemahan sekolah, maka pihak sekolah segera menangani hal tersebut sehingga kualitas SDN Pedurungan Tengah 01 Semarang dapat dicapai.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan evaluasi diri sekolah di SDN Pedurungan Tengah 01 Semarang.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini mengenai “Bagaimana Karakteristik Pengelolaan Evaluasi Diri Sekolah di SDN Pedurungan Tengah 01 Semarang?”. Adapun fokus tersebut dijabarkan menjadi 3 sub fokus sebagai berikut.

1. Bagaimana karakteristik perencanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) di SDN Pedurungan Tengah 01 Semarang?
2. Bagaimana karakteristik pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) di SDN Pedurungan Tengah 01 Semarang?.

3. Bagaimana karakteristik penilaian proses Evaluasi Diri Sekolah (EDS) di SDN Pedurungan Tengah 01 Semarang?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan karakteristik perencanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) di SDN Pedurungan Tengah 01 Semarang.
2. Mendeskripsikan karakteristik pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) di SDN Pedurungan Tengah 01 Semarang.
3. Mendeskripsikan karakteristik penilaian proses Evaluasi Diri Sekolah (EDS) di SDN Pedurungan Tengah 01 Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam ilmu manajemen pendidikan, khususnya manajemen dalam mengelola evaluasi diri sekolah serta dapat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan mutu pendidikan melalui proses evaluasi diri sekolah.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis kepada.

- a. Bagi kepala sekolah sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan evaluasi diri sekolah sebagai persiapan penilaian akreditasi sekolah.

- b. Bagi Dinas Pendidikan sebagai bahan masukan untuk merumuskan konsep mengenai pengelolaan evaluasi diri sekolah pada tingkat pendidikan dasar.
- c. Bagi warga sekolah dapat dijadikan *input* dalam pengembangan mutu sekolah sehingga ketika pelaksanaan evaluasi diri sekolah dapat tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam akreditasi.
- d. Bagi guru dijadikan sebagai bahan perbandingan dan bahan tambahan sebagai wujud keikutsertaan dalam pengelolaan evaluasi diri sekolah dasar.

## **E. Daftar Istilah**

### **1. Evaluasi Diri Sekolah**

Evaluasi diri sekolah adalah proses yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan untuk membantu sekolah dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).

### **2. Perencanaan**

Perencanaan yakni suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **3. Pelaksanaan EDS**

Pelaksanaan EDS adalah kegiatan yang emberikan dasar bagi perencanaan pengembangan sekolah dan karena itu akan dikaitkan dengan perencanaan pengembangan sekolah itu sendiri, dan membangun inisiatif lain dalam perencanaan pengembangan sekolah.

### **4. Evaluasi**

Evaluasi atau penilaian merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan dapat tercapai.